



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



JUMAT KLIWON

12 JULI 2024 (5 SURA 1958 / TAHUN LXXIX NO 269)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN



Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

DIVONIS 10 TAHUN DAN DENDA RP 300 JUTA Sidang SYL Berakhir Rusuh

JAKARTA (KR) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis terhadap Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. SYL dinyatakan terbukti melakukan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rentang waktu 2020-2023.

"Karena itu menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan hukuman penjara selama sepuluh tahun dan denda Rp 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/7).

Dalam putusan majelis hakim menjatuhkan juga pidana pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi SYL sebesar Rp 14,14 miliar ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat (AS) subsider dua tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis, terlebih dahulu

* Bersambung hal 7 kol 1

Analisis Krisis di KONOHA

Prof Dr Tulus Warsito MSI



AKHIR-AKHIR ini sering kita temui istilah KONOHA, baik di media sosial, surat kabar maupun televisi, yang selalu berkait dengan sindiran tentang negeri yang carut marut. Lebih sering lagi KONOHA selalu dikaitkan dengan otokritik tentang Indonesia yang semakin buruk.

KONOHA sendiri sebenarnya tidak langsung menunjuk Indonesia sebagai objek sindiran, melainkan negeri mana pun yang dianggap pantas untuk dikritik. KONOHA adalah singkatan dari Kingdom of Nepotism, Oligarchy and Hidden Ambitions (Negeri Nepotis, Oligarkis dan Ambisi Terselubung). Terlepas dari pantas atau tidak untuk mengangap negeri kita sebagai negeri Konoha, sebaiknya kita bercermin pada diri kita sendiri.

Ukuran paling sederhana untuk mencermati pantas tidaknya negeri kita disebut dengan negeri Konoha adalah dengan menanyakan; apakah di negeri kita dipimpin oleh para Nepotis? Apakah negeri kita terbebas dari kekuasaan

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Jumat, 12 Juli 2024	11:48	15:08	17:39	18:52	04:33

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

KASUS PEMBUNYAHAN VINA DAN EKY Polri Kaji Laporan Keluarga 7 Terpidana

JAKARTA (KR) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mencermati laporan dari pihak keluarga tujuh terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan teman laki-lakinya, Eky. Polri juga akan melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut terhadap laporan tersebut.

"Setiap ada laporan, tentu Polri akan menerima. Itu merupakan tugas Polri. Kami akan mencermati dan menganalisis hal-hal yang menjadi bagian dari laporan tersebut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Kamis (11/7).

Polri juga menyatakan menghargai kritik dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin terkait kasus Pegi Setiawan yang diputuskan bebas karena kesalahan prosedur hukum oleh Polda Jawa Barat (Jabar) dalam penangkapannya. "Ini bagian hal-hal pada putusan yang kita hargai. Terkait dengan masukan, kemudian kritik, Bapak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga selalu menekankan bahwa Polri tidak antikritik," kata Trunoyudo.

Menurutnya, kritik yang diberikan oleh Wapres akan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian, utamanya bagi Polda Jabar. "Dari Bareskrim Polri, dari Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tentunya harus menjadi evaluatif," tambahnya.

* Bersambung hal 7 kol 1

KASUS PENGGELAPAN UANG Suami BCL Diperiksa Polisi

JAKARTA (KR) - Kepolisian memeriksa suami penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Pradipta Aryawardhana sebagai saksi terkait adanya laporan polisi mengenai kasus dugaan penggelapan uang senilai Rp 6,9 miliar. Tiko hadir perdana sebagai saksi dan merupakan tahap penyidikan serta untuk memenuhi panggilan pihak Kepolisian.

"Sedang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Sekarang sesuai panggilan saksi," kata kuasa hukum Tiko, Irfan Aghasar saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/7).

Kedatangan Tiko tidak diketahui oleh awak media di kawasan Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan memanggil suami pe-



Tiko Arya Wardhana (kanan) bersama BCL.

nyanyi BCL tersebut terkait laporan kasus penggelapan uang senilai Rp 6,9 miliar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi menyatakan terlapor sudah dikirimkan surat panggilan sebagai saksi untuk diminta hadir memberikan keterangan oleh penyidik. Pemanggilan ter-

sebut berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk pelapor, yaitu mantan istrinya berinisial AW.

"Setelah beberapa saksi dilakukan pemeriksaan termasuk pelapor, pihak perbankan untuk mengetahui aliran dana, transaksi, karena dari laporan yang dibuat diduga ada

* Bersambung hal 7 kol 1

SUDAH SIAP DIKIRIM KE LUAR JAWA

17 Motor Bodong Gagal Diselundupkan

surat SPM alias bodong," jelas Koptol M Alfian Armin, Kamis (11/7).



Belasan sepeda motor bodong diamankan Polresta Pati.

Ia menyebutkan, penemuan belasan motor bodong itu, terjadi Selasa

(9/7) lalu. Berawal dari informasi masyarakat, mengenai adanya dua truk yang mengangkut beberapa kendaraan roda dua yang diparkir di pinggir jalan Desa Tanjungsari. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap motor-motor itu. Ternyata didapat kendaraan yang tanpa dilengkapi dokumen lengkap, seperti STNK.

Polisi kemudian mengamankan truk dan sopir bernisial AM (28), penduduk Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogowungu.

Menurut Kasatreskrim, berdasarkan keterangan AM, belasan sepeda motor bodong diambil secara bertahap dari luar Pati. Rencananya, sepeda motor tanpa dokumen lengkap tersebut dikirim ke luar Jawa. "Kami masih mendalami

kasus ini," tegas Koptol M Alfian Armin. (Cuk)-d



● SENIN 24 Juni 2024, saya ada acara di Jakarta. Saya berangkat dengan pesawat pertama dari YIA. Karena sangat dingin, pagi itu saya tidak mandi. Sampai di Jakarta, lanjut registrasi di tempat acara. Saya baru mandi sekitar pukul 15.00 di Hotel Sultan. Komentar isritiku ketika saya bercerita lewat telepon, "Kebangetan." (Triman Laksana, Jalan Raya Borobudur Km.01 Citaran Paremodu, Mungkid Magelang 56512)-f

Puan: DPR Tak Ingin Salah UUD RUU DPA Diusulkan Secepat Kilat

JAKARTA (KR) - Ketua DPR RI Puan Maharani tak ingin pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) justru menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Ia pun belum bisa memastikan, Wantimpres akan berubah nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Menurut Puan Maharani, hal tersebut tergantung pada pembahasan selanjutnya. "Nanti seperti apa namanya bentuk dari lembaga tersebut ya kita lihat pembahasannya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/7).

Sejauh ini, ujarnya, RUU tersebut bakal berisi tentang penguatan terhadap lembaga tersebut. Adapun RUU ini telah disetujui dalam Rapat Paripurna untuk menjadi usul inisiatif DPR RI.

Puan mengatakan, pembahasan RUU tentang Wantimpres akan dibahas pada masa sidang

selanjutnya Agustus 2024. Pasalnya, Rapat Paripurna yang menyetujui RUU tersebut menjadi usul inisiatif merupakan rapat penutupan masa sidang.

Anggota DPR RI Djarot Saiful Hidayat mengakui usulan RUU tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yang nomenklaturnya akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menempuh proses yang secepat kilat.

Djarot mengatakan, RUU tersebut sudah disetujui Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis kemarin menjadi usul inisi-

atif DPR RI untuk selanjutnya menempuh pembahasan. Bahkan, ia memperlakukan kepada masyarakat agar menilai RUU yang diusulkan dan disetujui secepat kilat tersebut.

"Coba tanya kepada para ahli hukum tata negara dengan keberadaan DPA ini," kata Djarot di kompleks parlemen, kemarin.

Menurutnya, DPA sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Untuk itu, ia meminta anggota DPR yang membahas untuk mengejawantahkan syarat-syarat dalam keanggotaan DPA. "Apalagi, posisinya itu sejajar, apa betul seperti itu? Sejarahnya seperti apa? Terus bagaimana pengisian orangnya?" ujar Djarot.

Ia yang juga bertugas sebagai Ketua Badan Pengkajian MPR RI mengaku belum pernah membahas amandemen

* Bersambung hal 7 kol 1

Polri Waspadai Lab Narkoba Rahasia

JAKARTA (KR) - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mewaspadai keberadaan laboratorium narkoba rahasia di Indonesia, melalui penguatan kerja sama dengan lembaga- lembaga terkait untuk melakukan deteksi dini dan penegakan hukum.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/7) mengatakan, selama tahun 2024 sudah ada lima pengungkapan laboratorium narkoba rahasia di Indonesia. "Untuk pengungkapan oleh jajaran Bareskrim sepanjang 2024 ini ada lima wilayah ya, Semarang (Jawa Tengah), Sunter (Jakarta Utara), Bali, Sumatera Utara, dan Malang (Jawa Timur)," kata Mukti.

Menurutnya, keberadaan laboratorium narkoba rahasia ini merupakan modus lama yang digunakan lagi para pelaku kejahatan narkoba untuk terus bisa memasarkan barang dagangannya.

Mukti menjelaskan, pada era tahun 2000-an, para bandar narkoba menggunakan modus mendirikan atau membuat laboratorium narkoba rahasia untuk memproduksi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi di Tanah Air. "Awal tahun 2000-an, dimana laboratorium narkoba rahasia itu menjamur," katanya.

Modus ini akhirnya terbaca aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Bea Cukai, maupun Imigrasi, yang melakukan penegakan hukum secara masif. Puncaknya pada tahun 2005, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang

* Bersambung hal 7 kol 5